



DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA

013780121
70
90/00121

KEDUDUKAN SOSIAL DAN PENGENDALIAN SOSIAL

UNIVERSITAS TERBUKA

OLEH:

MIMMI ARUMI WARDIATI

NIP. 131 573 168

1989

BAHAN PENUNJANG PROGRAM STUDI
BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TERBUKA

8021

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu tidak dapat hidup tanpa melakukan tindakan internal dengan manusia sesamanya dalam rangka kehidupan masyarakat. Interaksi tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal. Sedangkan interaksi formal dikenal dengan pranata yaitu suatu sistem norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktifitas masyarakat yang khusus, sehingga banyaknya pranata tergantung dari sifat kompleksnya kebudayaan yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Koentjaraningrat, pp 166-167 mengemukakan pranata sebagai berikut :

1. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu yang sering disebut kinship atau domestic institutions.
2. Pranata-pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusikan hasil produksi dan harta disebut economic institutions.
3. Pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna disebut educational institutions.
4. Pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya disebut Scientific institutions.

5. Pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahannya dan untuk rekreasi disebut aesthetic and recreational institutions.
6. Pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dengan dan berbakti kepada Tuhan atau alam gaib disebut religious institutions.
7. Pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat disebut political institutions.
8. Pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia disebut somatic institutions.

Dari pranata-pranata tersebut di atas, maka manusia dalam kehidupan masyarakat ikut berperan dalam pola struktur sosial serta berkaitan dengan kedudukan ataupun peranan sosial.

BAB II

KEDUDUKAN SOSIAL DAN PENGENDALIAN SOSIAL

1. Kedudukan Sosial

Interaksi manusia dalam sosial mewujudkan pola-pola sosial dalam masyarakat. Manusia yang melakukan interaksi sering menganggap dirinya berada dalam kedudukan sosial tertentu yang juga dikonsepsikan untuk mereka oleh norma-norma yang menata seluruh tindakan tadi. Dengan demikian konsep kedudukan menjadi unsur yang penting dalam usaha manusia hidup bermasyarakat. Dalam rangka kedudukan-kedudukan dalam suatu pranata itulah pada individu manusia sebagai warga masyarakat bertindak menurut norma-norma khusus dari kedudukan khusus dalam pranata itu. Sedangkan apabila dilihat dari sisi lain maka tingkah laku atau performance individu manusia yang menentukan suatu kedudukan tertentu disebut peranan sosial atau socialrole. Peranan itu sendiri berarti kekhususan atau juga disebut khas yang dipentaskan atau dilakukan oleh individu dalam kedudukan dimana individu tersebut berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan-kedudukan lain. Dengan demikian maka kedudukan seseorang dapat berubah-ubah dari suatu peranan ke peranan yang lain dan kadang-kadang jarak perubahan tersebut begitu dekat atau hampir tidak kelihatan lagi. Hal tersebut berarti seseorang dapat se-

kaligus bertindak dua atau lebih peranan sosial pada saat tertentu. Sebagai contoh dapat dikemukakan pranata kekerabatan yaitu perkawinan, maka kedudukan individu seseorang tersebut dapat menjadi ayah, suami, anak laki-laki, kakak laki-laki, isteri, anak perempuan, kakak perempuan dan sebagainya. Kedudukan tersebut satu orang menduduki semua status dan dalam kehidupan sehari-hari mementaskan semua peranan sekaligus, walaupun kenyataan ada peralihan tiap saat dari satu kedudukan ke dalam kedudukan yang lain. Bahkan mungkin dapat terjadi seseorang dalam suatu keadaan dapat bertindak sampai tiga atau empat bersamaan dan juga bertindak sebagai peranan pada-saat yang sama. Individu tersebut pada saat bertindak dengan berperan sosial ayah terhadap anaknya, pada sisi lain sebagai suami terhadap isterinya, pada saat lain berperan sebagai anak laki-laki terhadap ayahnya.

Setiap individu dalam masyarakat mempunyai dua macam kedudukan, yaitu :

- a. Kedudukan tergariskan atau ascribed status, yakni kedudukan yang dapat diperoleh dengan sendirinya.
- b. Kedudukan diusahakan atau achieved status, yakni kedudukan yang hanya dapat diperoleh dengan usaha.

Individu menurut jenis kelaminnya, dalam semua masyarakat mempunyai berbagai kewajiban tertentu yang seolah-olah telah digariskan oleh adat masyarakat masing-masing, disamping itu juga mereka dituntut untuk berperan mempunyai ke-

dudukan yang tidak menurut adat tetapi harus dicapai dengan usaha. Misalnya seorang wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam keluarganya, namun yang bersangkutan bereperan sebagai manajer di suatu instansi. kedudukan manajer bukan digariskan, tetapi karena yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan keahlian yang memungkinkan jadi manajer.

2. Pengendalian Sosial.

Kedudukan Sosial sangat berpengaruh terhadap pengendalian sosial atau social control karena berkaitan dengan hak dan kewajiban individu terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan di masyarakat yang tidak terlepas dari adat istiadat, norma dan hukum yang berlaku. Setiap pranata yang mempunyai macam-macam kedudukan menentukan peranan sosialnya terhadap tindakan-tindakan lain individu masyarakat dalam interaksi sosial, Tindakan-tindakan, tersebut dilakukan menurut aturan-aturan tertentu, yaitu menurut norma-norma khusus, jelas, tegas dan tidak meragukan. Norma-norma dalam suatu pranata dan sub-sub pranatanya selalu berkaitan satu sama lain dan merupakan suatu sistem dalam pengendalian sosial. Dalam perkembangan norma-norma tersebut berakibat adanya hukum yang dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Hukum adalah suatu aktivitas di dalam rangka suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial/pengendalian sosial.

- b. Atribute otoritas atau kekuasaan menentukan bahwa aktivitas kebudayaan yang disebut hukum, adalah keputusan-keputusan melalui mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat, atribut ini disebut attribute of authority.
- c. Atribute yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu yang lama, atribut ini disebut attribute of intention of universal application.
- d. Atribut yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung perumusan dari kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu. Jadi ada unsur hak dan kewajiban. Atribut ini disebut attribute of obligation.
- e. Atribut yang menentukan bahwa keputusan - keputusan dari pihak berkuasa harus dilakukan dan dikuatkan dengan sanksi dan sanksi tersebut dapat berbentuk jasmaniah dan rohaniah.

BAB III

P E N U T U P

Pada hakekatnya setiap individu manusia mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan namun dapat dipahami bahwa keduanya mempunyai arti yang sangat penting dalam arti kedudukan sosial.

Kedudukan sosial berkaitan dengan pranata sosial, yang merupakan arah dari kehidupan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban dalam kedudukan dan peran sosial. Dengan demikian kedudukan sosial dan pengendalian sosial merupakan proses sosial budaya yang akan berlangsung terus menerus dan berkesinambungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu-Antropologi, Penerbit; Aksara Baru, Jakarta; 1986 - 391.
2. Munandar Soelaeman, M. Ir., Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Penerbit Eresco, PT. Bandung; 1986-192
3. Mustopo, Habib, M., Ilmu Budaya Dasar; Manusia dan Budaya, Penerbit; Usaha Nasional, Surabaya; 1983-276.

UNIVERSITAS TERBUKA